

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya Goodgovernance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana dimaklumi untuk mencapai Program Pembangunan Daerah yang merupakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya pengelolaan di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan taraf hidup masyarakat, sehingga berdampak terhadap capaian IPM di Kota Batam.

Keberadaan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dalam rangka mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Batam, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ yang didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Menjawab tanggung jawab yang diberikan, maka Dinas Pendidikan Kota Batam telah menetapkan 5 (lima) Kebijakan Umum dan Anggaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam, yakni :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat;



Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam disiasati dengan membebaskan sebagian pembangunan melalui APBN Bidang Pendidikan yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai Tugas dan Fungsinya

### **2. Fungsi**

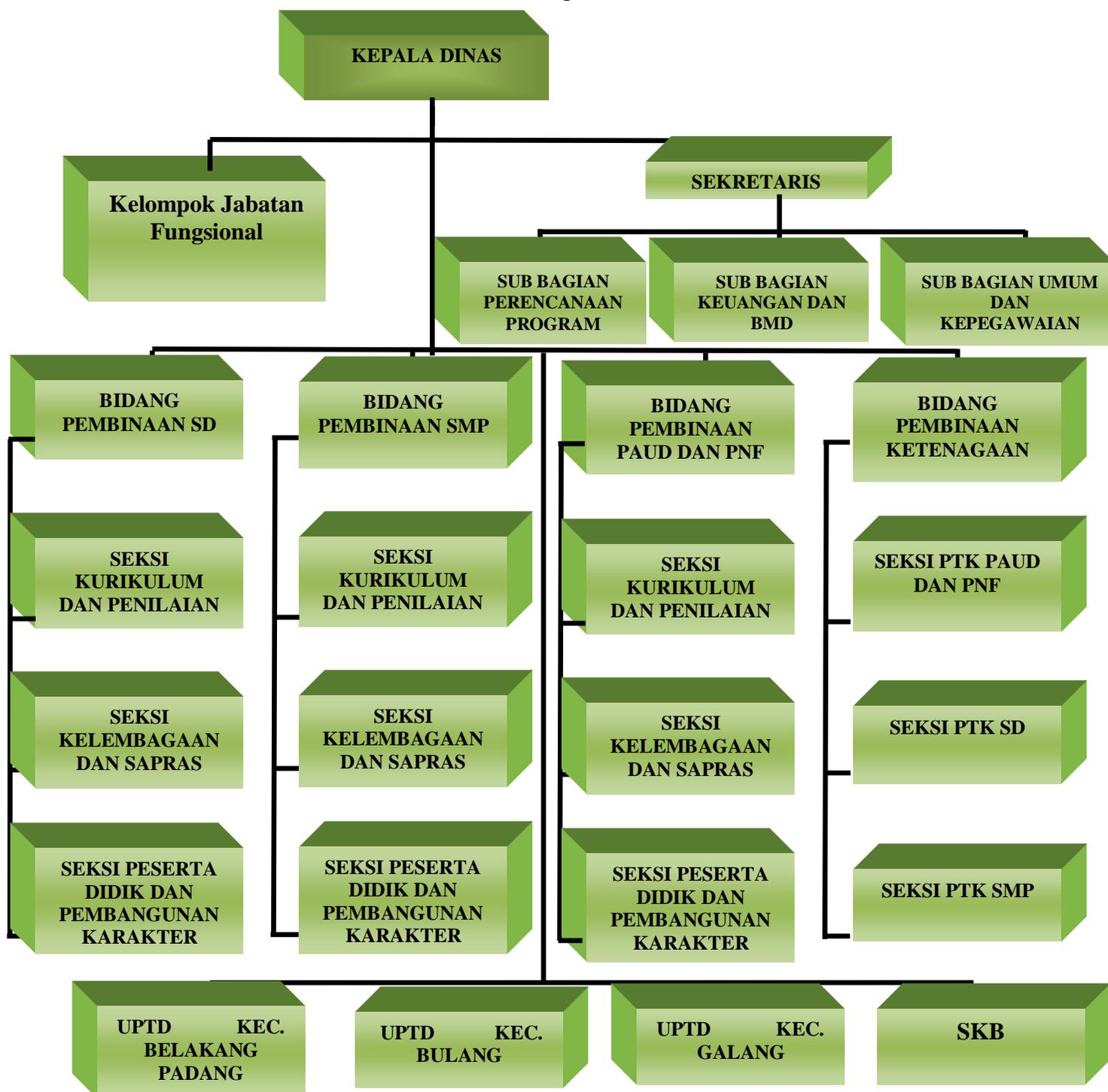
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi SKPD antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.



### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur yang ada masih dipandang kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh penjuru Kota Batam khususnya masyarakat yang berada di daerah Hinterland. Sehingga pada akhirnya dilakukan penambahan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara garis lurus berada dibawah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibagi dalam beberapa unit, yang terdiri antara lain :

1. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Galang
2. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Bulang
3. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Belakang Padang

Selain ketiga unit tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batam juga menaungi sekolah-sekolah yang berada di Kota Batam. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah sekolah di Dinas Pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan pada tabulasi berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Sekolah di Kota Batam**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Berdasarkan Status Sekolah	
		Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-Kanak/RA	19/0	551/134
2.	Sekolah Dasar/MI	144/2	200/30
3.	Sekolah Menengah Pertama/MTs	57/2	89/19

*Sumber Data : Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa*

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Batam (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2017 sebanyak : 96 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan serta 3 UPT cabang Dinas (Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan).



**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	
1.	Golongan I	0	
2.	Golongan II	9	
3.	Golongan III	32	
4.	Golongan IV	18	
5.	Non PNS		37
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>37</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>96</b>	

**Tabel 1.3.**  
**Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>							<b>JML</b>
		<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>DII</b>	<b>DIII</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	
<b>I</b>	<b>STRUKTURAL</b>								
	a. Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	1
	b. Eselon III	-	-	-	-	3	2	-	5
	c. Eselon IV	-	-	-	-	8	7		15
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	<b>11</b>	<b>10</b>	-	<b>21</b>

Tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 10.210 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 69.74% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Tabel 1.4

**Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	0	500	16	37	1.209	11	1	1.774
2	SD	400	17	92	152	5.872	143	0	6.676
4	SMP	102	7	8	48	1.521	73	1	1.760
<b>Total</b>		<b>539</b>	<b>525</b>	<b>118</b>	<b>289</b>	<b>10.708</b>	<b>339</b>	<b>2</b>	<b>10.210</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Tabel:1.5

**Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian**

No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	56	1.718	1.774
2	SD	2.400	4.276	6.676
3	SMP	633	1.127	1.760
<b>Total</b>		<b>3.089</b>	<b>7.121</b>	<b>10.210</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam



## 1. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

**Tabel 1.6**  
Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
<b>Usia 4-6 Tahun</b>	64.024	TK/PAUD	20.482
<b>Usia 7-12 Tahun</b>	118.502	SD/MI	114.844
<b>Usia 13-15 Tahun</b>	41.088	SMP/MTS	37.297
<b>Usia 16-18 Tahun</b>	38.992	SMA/MA/SMK	34.897

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

## 2. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

**Tabel 1.7**  
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sdg/Brk
TK/PAUD	500	1032	506	511	15
SD	344	3.007	1.469	1.383	155
MI	33	220	153	57	10
SMP	143	1.107	580	474	53
MTs	18	107	73	27	7
<b>JUMLAH</b>	<b>1.038</b>	<b>5.473</b>	<b>2.781</b>	<b>2.452</b>	<b>240</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Pembangunan pendidikan menuju Pendidikan Indonesia 2017 direncanakan tidak ada lagi penduduk yang tidak bersekolah di tingkat pendidikan dasar, dengan demikian akan



terwujud derajat pendidikan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan yang kondusif dan dengan perilaku yang rasional dalam kehidupan sosial, serta memiliki kemampuan berperilaku positif, adil dan merata serta memiliki derajat pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan bidang pendidikan diperlukan perencanaan strategik agar arah pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan fokus sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

## D. VISI DAN MISI

### 1. Pernyataan Visi Dinas Pendidikan Kota Batam

Visi Pembangunan Pendidikan Kota Batam melalui Perencanaan Strategi 2016 – 2021 adalah :

***"TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA,  
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING,***

***"***

### 2. Pernyataan Misi

Dalam upaya pencapaian visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen RPJMD, maka selanjutnya Dinas Pendidikan membuat dokumen Renstra dengan mencantumkan visi yang memiliki benang merah dari visi dan misi kepala daerah. Setelah visi tersebut ditetapkan selanjutnya disusun misi untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan tersebut.

Misi Dinas Pendidikan Kota Batam terdiri dari :

- a. Mencerdaskan Sumber Daya Manusia yang kreatif , inovatif , dan Kompetitif;
- b. Meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang bermutu dan merata;
- c. Meningkatkan Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang berintegritas;
- d. Meningkatkan Kesetaraan layanan pendidikan dalam keterlibatan pelaku pendidikan;
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola yang dinamis, kreatif ,inovatif dan Akuntabel;



## *Bab 2*

# *Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*

### **A. PERENCANAAN**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi OPD yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan oleh Kepala OPD untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan OPD dalam menjalankan rencananya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan Pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam adalah pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, mutu dan relevansi, dan manajemen pendidikan khususnya pendidikan Dasar dan Menengah, Penekanan akan pentingnya pembangunan pendidikan, dibutuhkan karena semua pihak meyakini bahwa pembangunan di masa mendatang disamping tetap bertumpu pada pembangunan ekonomi, akan bertumpu pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam Pola dasar Pembangunan Kota Batam ditegaskan bahwa titik berat pembangunan bidang pendidikan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat atau stakeholder pendidikan.

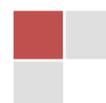


## 1. Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan suatu indikator kinerja utama yang menjadi pedoman dalam menentukan keberhasilan suatu SKPD :

Tabel 2.1.  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	Persentase APK PAUD	APK PAUD=Jumlah Penduduk yang bersekolah PAUD dibagi Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun dikali 100%	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
		Persentase APK SD	APK SD=Jumlah Penduduk yang bersekolah SD dibagi Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun dikali 100%	Bidang Pembinaan SD
		Persentase APM SD	APM SD=Jumlah Penduduk yang berusia 7-12 tahun bersekolah SD dibagi Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun dikali 100%	Bidang Pembinaan SD
		Persentase APK SMP	APK SMP=Jumlah Penduduk yang bersekolah SMP dibagi Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun dikali 100%	Bidang Pembinaan SMP
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase TK Berakreditasi B	Jumlah TK berakreditasi minimal B dibagi Jumlah TK Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan TK
		Persentase SD Berakreditasi Minimal B	Jumlah SD berakreditasi minimal B dibagi Jumlah SD Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan SD
		Persentase SMP Berakreditasi Minimal B	Jumlah SMP berakreditasi minimal B dibagi Jumlah SMP Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan SMP



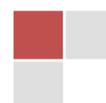
3	Penguatan tatakelola layanan pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Terciptanya Pelayanan perkantoran yang Efektif dan Efisien	Sekretariat
4	Kualitas Sumber daya masyarakat	Persentase tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	Masyarakat yang menerima bantuan pendidikan jenjang S1 melalui jalur undangan untuk 5 PTN teratas nasional	Bidang Pembinaan Ketenagaan
5	Peran serta masyarakat terhadap pendidikan	Meningkatnya peran serta masyarakat	Meningkatnya peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah	Sekretariat

## B. Rencana Strategis (RENSTRA)

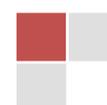
Sesuai dengan dokumen RPJMD, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah **Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa**. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan**

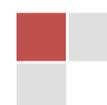
TUJUAN DAN SARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T1	Kualitas Pendidikan								
	S1	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	APK TK	27	28	30	32	35	40
			APK SD	103,47	104,2	104,5	105	105,5	106
			APM SD	92	93	94	95	96	97
			APK SMP	102,45	105,5	106	106,5	107	107,5
			APM SMP	82	83	84	85	86	87
S.1.1	Meningkatkan Minat Orang tua untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD	Meningkatnya Persentase anak yang mendaftar ke lembaga PAUD	18,01	18,52	19,06	19,59	20,13	20,59	



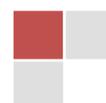
	S.1.1.1	Sosialisasi Pendidikan PAUD melalui Pembinaan pendidikan anak usia dini terintegrasi	Terlaksananya sosialisasi minat orang tua mendaftarkan anak ke lembaga PAUD (64 Kelurahan)	100	100	100	100	100	100
	S.1.2	Ketersediaan Sarana Pendidikan PAUD	Jumlah peningkatan daya tampung TK pada satuan pendidikan negeri	1164	1164	1164	1164	1164	1304
	S.1.2.1	Terbangunnya GSB TK	Jumlah GSB TKN yang dibangun	0	0	0	0	1	1
	S.1.2.1	Terbangunnya RKB TK	Jumlah RKB TKN yang dibangun	2	0	0	4	6	6
	S.1.3	Ketersediaan Sarana Pendidikan SD	Persentase daya tampung SD	42,92	45,87	49,70	55,64	61,95	65,84
	S.1.2.2	Terbangunnya GSB SD	Jumlah GSB SDN yang dibangun	0	0	0	2	2	2
	S.1.2.3	Terbangunnya RKB SD	Jumlah RKB SDN yang dibangun	24	33	50	45	50	50
	S.1.4	Ketersediaan Sarana Pendidikan SMP	Persentase daya tampung SMP	41,14	42,73	47,49	53,04	59,07	63,37
	S.1.2.4	Terbangunnya GSB SMP	Jumlah GSB SMPN yang dibangun	0	0	2	2	2	2
	S.1.2.6	Terbangunnya RKB SMP	Jumlah RKB SMPN yang dibangun	10	30	35	35	40	40
S2	Mutu Layanan Pendidikan		Persentase sekolah berakreditasi minimal B						
			PAUD	36,46	41,35	45,00	48,00	53,00	60,00
			SD	53,58	56,00	61,00	64,00	67,00	70,00
			SMP	64,59	67,00	69,00	71,00	74,00	78,00
	S.2.1	Pembinaan dan Pengembangan PAUD	Jumlah lembaga PAUD	493	529	530	531	532	533
	S.2.1.1	Penyusunan dan Pengembangan	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	78,40	80,20	83,00	86,00	92,00	100



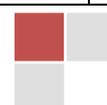
			kurikulum PAUD							
	S.2.1.2	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana PAUD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	71,26	74,60	77,00	80,00	82,00	84,00	
	S.2.1.3	Ketersediaan media Penunjang Pembelajaran PAUD	Persentase Sekolah memiliki media penunjang pembelajaran	60,11	63,23	66,00	69,00	72,00	75,00	
	S.2.1.4	Peningkatan kecakapan motorik peserta didik PAUD	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan kreasi anak PAUD	80,00	83,00	87,00	90,00	93,00	95,00	
	S.2.2	Peningkatan status rapor mutu SD	Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	279	281	286	291	296	301	
	S.2.2.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	58,60	62,40	68,50	82,50	90,00	100	
	S.2.2.2	Peningkatan kualitas lulusan SD	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD	69,12	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50	
	S.2.2.3	Ketersediaan sarana dan prasarana Penunjang Pembelajaran SD	Persentase Sekolah memiliki sarana penunjang pembelajaran	62,50	68,00	72,00	76,00	78,00	80,00	
	S.2.2.4	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana SD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	60,20	64,00	70,00	72,00	74,00	76,00	
	S.2.2.5	Siswa berprestasi SD	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	3	3	3	3	
			Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	22	23	24	24	25	26	



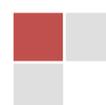
	S.2.3	Peningkatan status rapor mutu SMP	Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	116	119	124	129	133	137
	S.2.3.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SMP	Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan K 13	62,83	72,70	78,50	84,80	93,00	100
	S.2.3.2	Peningkatan kualitas lulusan SMP	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	55,24	55,74	56,00	56,25	56,50	56,80
	S.2.3.3	Ketersediaan sarana dan prasarana Penunjang Pembelajaran SMP	Persentase Sekolah memiliki sarana penunjang pembelajaran	78,91	79,50	80,20	80,60	80,70	80,90
	S.2.3.4	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana SMP	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	60,20	60,60	70,00	71,30	72,50	75,00
	S.2.3.5	Siswa berprestasi SMP	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	3	3	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	28	28	28	28	28	28
	S.2.4	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD dan SMP	Persentase meningkatnya Guru TK, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik	18,83	20,25	21,30	22,72	24,19	25,65
			Persentase Meningkatnya Kepala sekolah negeri yang memiliki sertifikat kepala sekolah	86,04	86,04	88,37	90,70	93,02	95,35
	S.2.4.1	Peningkatan sertifikasi Guru TK	Persentase Guru TK yang bersertifikasi pendidik	10,12	11,18	11,85	12,86	13,86	14,86
	S.2.4.2	Peningkatan sertifikasi Guru SD	Persentase Guru SD yang bersertifikasi pendidik	19,48	21,24	22,28	23,86	25,44	27,01



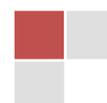
		S.2.4.3	Peningkatan sertifikasi Guru SMP	Persentase Guru yang bersertifikasi pendidik	21,51	23,65	24,92	26,82	28,76	30,67
		S.2.4.4	Peningkatan mutu guru kelas SD	Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan guru kelas	198	298	398	500	600	700
		S.2.4.5	Peningkatan mutu guru mata pelajaran SMP	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan keahlian di bidang yang di ampu	128	230	330	440	550	650
		S.2.4.6	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah TK	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	0	0	0	10	20	30
		S.2.4.7	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SD	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	31	31	31	51	71	90
		S.2.4.8	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SMP	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	19	19	19	39	59	80
		S.2.4.9	Pembinaan Calon Kepala sekolah	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah	16	46	46	46	76	76
		S.2.4.10	Peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan keahlian	150	150	150	150	150	150
		S.2.5	Mutu pengawas sekolah	Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat pengawas	34	34	34	38	41	41
		S.2.5.1	Peningkatan sertifikasi Pengawas Sekolah	Jumlah yang mengikuti diklat calon pengawas/peningkatan Kompetensi Pengawas	0	41	34	38	41	41
S3	Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan			Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100	100



	S.3.1	Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland	Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	66	66	66	66
	S.3.1.1	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Belakang padang	Jumlah sekolah yang terlayani	20	20	20	20	20	20
	S.3.1.2	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Bulang	Jumlah sekolah yang terlayani	15	15	15	15	15	15
	S.3.1.3	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Galang	Jumlah sekolah yang terlayani	31	31	31	31	31	31
	S.3.2	Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian tata kelola perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	S.3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan program	Persentase dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	S.3.2.2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	S.3.2.3	Tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase capaian pengelolaan realisasi keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran	100	100	100	100	100	100
			Persentase temuan hasil	100	100	100	100	100	100



				pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjut						
	S.3.3	Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan		Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang terlayani	100	100	100	100	100	100
	S.3.3.1	Kenaikan pangkat dan penghargaan		Persentase kenaikan pangkat dan penghargaan aparatur	100	100	100	100	100	100
	S.3.3.2	Disiplin aparatur		Persentase kehadiran tepat waktu aparatur kantor dinas pendidikan	100	100	100	100	100	98,00
	S.3.3.3	Pembinaan aparatur		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50	50	50	50	50	50
T2	Pendidikan Masyarakat									
S4	Kualitas Sumber daya masyarakat			Persentase tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
	S.4.1	Bantuan Pendidikan		Persentase tersalurnya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
	S.4.1.1	Beasiswa mahasiswa undangan 5 PTN teratas		Jumlah masyarakat yang menerima beasiswa undangan 5 PTN teratas	60	60	65	70	75	80
	S.4.2	Lembaga Pendidikan Masyarakat		Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga pendidikan masyarakat	100	100	100	100	100	100
	S.4.2.1	Pembinaan Lembaga kursus dan Pelatihan yang menerapkan KKNi		Jumlah Lembaga kursus yang menerapkan KKNi	1	2	3	4	5	6



		S.4.2.2	Pembinaan Lembaga PKBM	Terlaksananya pembinaan lembaga PKBM	100	100	100	100	100	100
S5	Peran serta masyarakat terhadap pendidikan			Meningkatnya peran serta masyarakat	100	100	100	100	100	100
	S.5.1	Penguatan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah		Terlaksananya koordinasi terhadap Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	100	100	100	100	100	100
		S.5.1.1	Peningkatan Peran dan fungsi komite sekolah	Terlaksananya pembinaan Peran dan fungsi komite sekolah	100	100	100	100	100	100

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan di wujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan di wujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola nya. Manfaat dari perjanjian kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kineja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemereintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2016 terdapat 11 sasaran strategis yang akan di wujudkan dinas pendidikan kota batam. Kesebelas sasaran tersebut terdiri atas urusan wajib pendidikan, urusan . target ,yang btertuang dalam perjanjian tersebut akan di wujudkan melalui berbagai program dan kegiatan dinas pendidikan kota batam tahun 2017.

Berikut adalah perjanjian kinerja dinas pendidikan kota batam:

*Dinas Pendidikan Kota Batam // Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Tahun 2017)*



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	<b>MUSLIM BIDIN</b>
Jabatan	:	<b>KEPALA DINAS</b>
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama	:	<b>MUHAMMAD RUDI</b>
Jabatan	:	<b>WALIKOTA BATAM</b>

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

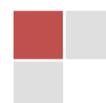
Batam, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**MUHAMMAD RUDI**

**MUSLIM BIDIN**  
NIP 19580412 198703 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DINAS PENDIDIKANKOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan daya tampung PAUD dan Alat Peraga	Terpenuhinya kebutuhan daya tampung dan alat peraga PAUD	64 %
2.	Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA	APK SD	119 %
		APK SMP	107 %
		APM SD	106 %
		APM SMP	99,10 %
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Guru bersertifikat SD dari 292 menjadi 770	770

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 235.867.665.272,42,-	70 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.083.602.210.00,-	1 kegiatan
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Rp 29.201.972.519,45,-	7 kegiatan
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Rp 4.943.616.740.00,-	2 kegiatan
5. Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Kependidikan	Rp 2.577.541.717,74,-	3 kegiatan



6. Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	Rp. 2.569.800.000.00,-	1 kegiatan
Total	Rp. 277.244.198.459,61,-	84 Kegiatan

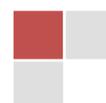
Batam, , Januari 2017

**WALIKOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BATAM**

**MUHAMMAD RUDI**

**MUSLIM BIDIN  
NIP 19580412 198703 1 011**



## *Bab 3*

### *Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan*

Penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja disemua jenjang pada Dinas Pendidikan, telah ditetapkan target kinerja yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Khususnya pada tahun 2017. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan suatu informasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atau atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2017. Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisisnya, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang



diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017, Dinas Pendidikan Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010



Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dan disajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN**

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau efisien. Karena itu kualitas pelayanan sangat penting dan seharusnya selalu fokus pada kepuasan pelanggan. Bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memberikan pelayanan pada layanan pendidikan harus memiliki ukuran keberhasilan menjalankan program dan kegiatan dalam bentuk Kinerja. Kinerja menunjukkan ukuran yang dijadikan dasar untuk mengukur dan menilai sejauh mana program dan kegiatan dapat terealisasi dalam periode kerja yang ditargetkan. Indikator kinerja program menyangkut hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan sementara indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait langsung dengan indikator program. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tentu dapat diukur dengan capaian tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, target dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi landasan bagi semua pelaksana program dan kegiatan untuk tetap fokus dan konsisten dalam komitmen yang dibangun untuk tercapainya kinerja yang maksimal. Berdasarkan renstra dan renja dinas Pendidikan telah ditetapkan indikator kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Persentase APK PAUD
2. Persentase APK SD
3. Persentase APM SD
4. Persentase APK SMP
5. Persentase TK Berakreditasi B
6. Persentase SD Berakreditasi Minimal B
7. Persentase SMP Berakreditasi Minimal B
8. Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien



9. Persentase tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat  
 10. Meningkatnya peran serta masyarakat

Capaian kinerja Dinas Pendidikan di tahun 2017 merupakan Dari pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2017 telah dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran selama satu tahun. Mengingat ditahun 2016 terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Peralihan Rencana Strategis dari Tahun 2011-2016 ke Rencana strategis 2016-2021, maka telah dilakukan review terhadap indikator kinerja serta sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan Renstra dan Renja dinas pendidikan terdapat dua tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan telah ditetapkan beberapa sasaran dengan rincian 3 sasaran untuk tujuan satu dan 2 sasaran untuk tujuan dua. Dari hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2017 capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

TUJUAN DAN SARAN		INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			2016	2016	2017	2017	
T1	Kualitas Pendidikan						
	S1	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	APK TK	27	27	28	28
			APK SD	103,47	103,48	104,2	104
			APM SD	92	92	93	92,84
			APK SMP	102,45	102,45	105,50	105,51
			APM SMP	82	81,51	83	82,91
	S.1.1	Meningkatkan Minat Orang tua untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD	Meningkatnya Persentase anak yang mendaftar ke lembaga PAUD	18,01	18,01	18,52	18,53
S.1.1.1	Sosialisasi Pendidikan PAUD melalui Pembinaan pendidikan	Terlaksananya sosialisasi minat orang tua mendaftarkan anak ke lembaga PAUD (64 Kelurahan)	100	100	100	100	



		anak usia dini terintegrasi					
	S.1.2	Ketersediaan Sarana Pendidikan PAUD	Jumlah peningkatan daya tampung TK pada satuan pendidikan negeri	1164	1164	1164	1244
	S.1.2.1	Terbangunnya GSB TK	Jumlah GSB TKN yang dibangun	0	0	0	0
	S.1.2.1	Terbangunnya RKB TK	Jumlah RKB TKN yang dibangun	2	2	0	2
	S.1.3	Ketersediaan Sarana Pendidikan SD	Persentase daya tampung SD	42,92	42,92	45,87	45,67
	S.1.2.2	Terbangunnya GSB SD	Jumlah GSB SDN yang dibangun	0	0	0	0
	S.1.2.3	Terbangunnya RKB SD	Jumlah RKB SDN yang dibangun	24	36	33	31
	S.1.4	Ketersediaan Sarana Pendidikan SMP	Persentase daya tampung SMP	41,14	41,14	42,73	46,68
	S.1.2.4	Terbangunnya GSB SMP	Jumlah GSB SMPN yang dibangun	0	1	0	0
	S.1.2.6	Terbangunnya RKB SMP	Jumlah RKB SMPN yang dibangun	10	14	30	36
S2	Mutu Layanan Pendidikan		Persentase sekolah berakreditasi minimal B				
			PAUD	36,46	36,46	41,35	39,99
			SD	53,58	53,58	56,00	64,53
			SMP	64,59	64,59	67,00	67,36
	S.2.1	Pembinaan dan Pengembangan PAUD	Jumlah lembaga PAUD	493	498	529	508
	S.2.1.1	Penyusunan dan Pengembangan	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	78,40	78,40	80,20	80,50



		kurikulum PAUD					
	S.2.1.2	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana PAUD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	71,26	71,26	71,26	71,26
	S.2.1.3	Ketersediaan media Penunjang Pembelajaran PAUD	Persentase Sekolah memiliki media penunjang pembelajaran	60,11	60,11	60,11	60,11
	S.2.1.4	Peningkatan kecakapan motorik peserta didik PAUD	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan kreasi anak PAUD	80,00	80,00	80,00	80,00
	S.2.2	Peningkatan status rapor mutu SD	Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	279	279	281	283
	S.2.2.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	58,60	58,60	62,40	64,20
	S.2.2.2	Peningkatan kualitas lulusan SD	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD	69,12	70,65	69,50	69,90
	S.2.2.3	Ketersediaan sarana dan prasarana Penunjang Pembelajaran SD	Persentase Sekolah memiliki sarana penunjang pembelajaran	62,50	62,50	68,00	68,00
	S.2.2.4	Kondisi layak guna	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi	60,20	61,56	64,00	65,86



		Sarana dan prasarana SD	baik				
	S.2.2.5	Siswa berprestasi SD	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	2	2
			Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	22	22	23	23
S.2.3	Peningkatan status rapor mutu SMP		Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	116	116	119	120
	S.2.3.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SMP	Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan K 13	62,83	62,83	72,70	68,86
	S.2.3.2	Peningkatan kualitas lulusan SMP	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	55,24	58,53	55,74	56,02
	S.2.3.3	Ketersediaan sarana dan prasarana Penunjang Pembelajaran SMP	Persentase Sekolah memiliki sarana penunjang pembelajaran	78,91	78,91	79,50	80,14
	S.2.3.4	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana SMP	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	60,20	60,20	60,60	61,88
	S.2.3.5	Siswa berprestasi SMP	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	2	2



			Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	28	28	28	26
S.2.4	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD dan SMP		Persentase meningkatnya Guru TK, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik	18,83	18,83	20,25	20,56
			Persentase Meningkatnya Kepala sekolah negeri yang memiliki sertifikat kepala sekolah	86,04	86,04	86,04	86,74
S.2.4.1	Peningkatan sertifikasi Guru TK		Persentase Guru TK yang bersertifikasi pendidik	10,12	10,12	11,18	11,23
S.2.4.2	Peningkatan sertifikasi Guru SD		Persentase Guru SD yang bersertifikasi pendidik	19,48	19,48	21,24	22,24
S.2.4.3	Peningkatan sertifikasi Guru SMP		Persentase Guru yang bersertifikasi pendidik	21,51	21,51	23,65	24,33
S.2.4.4	Peningkatan mutu guru kelas SD		Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan guru kelas	198	198	298	298
S.2.4.5	Peningkatan mutu guru mata pelajaran SMP		Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan keahlian di bidang yang di ampu	128	128	230	280
S.2.4.6	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah TK		Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	0	0	0	0
S.2.4.7	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala		Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	31	31	31	31



			Sekolah SD					
	S.2.4.8	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SMP	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	19	19	19	19	
	S.2.4.9	Pembinaan Calon Kepala sekolah	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah	16	16	46	46	
	S.2.4.10	Peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan keahlian	150	0	150	150	
	S.2.5	Mutu pengawas sekolah	Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat pengawas	34	34	34	34	
	S.2.5.1	Peningkatan sertifikasi Pengawas Sekolah	Jumlah yang mengikuti diklat calon pengawas/peningkatan Kompetensi Pengawas	0	0	41	31	
S3	Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan		Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	
	S.3.1	Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland	Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	66	66	
	S.3.1.1	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Belakang padang	Jumlah sekolah yang terlayani	20	20	20	20	



		S.3.1.2	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Bulang	Jumlah sekolah yang terlayani	15	15	15	15
		S.3.1.3	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Galang	Jumlah sekolah yang terlayani	31	31	31	31
		S.3.2	Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian tata kelola perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100
		S.3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan program	Persentase dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100
		S.3.2.2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100
		S.3.2.3	Tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase capaian pengelolaan realisasi keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran	100	100	100	100
				Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjuti	100	100	100	100
		S.3.3	Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas	Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100	100	100



			pendidikan				
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang terlayani	100	100	100
		S.3.3.1	Kenaikan pangkat dan penghargaan	Persentase kenaikan pangkat dan penghargaan aparatur	100	100	100
		S.3.3.2	Disiplin aparatur	Persentase kehadiran tepat waktu aparatur kantor dinas pendidikan	100	100	100
		S.3.3.3	Pembinaan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50	50	50
T2	Pendidikan Masyarakat						
	S4	Kualitas Sumber daya masyarakat		Persentase tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100
		S.4.1	Bantuan Pendidikan	Persentase tersalurannya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100
		S.4.1.1	Beasiswa mahasiswa undangan 5 PTN teratas	Jumlah masyarakat yang menerima beasiswa undangan 5 PTN teratas	60	50	60
		S.4.2	Lembaga Pendidikan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga pendidikan masyarakat	100	100	100
		S.4.2.1	Pembinaan Lembaga kursus dan Pelatihan yang menerapkan KKNI	Jumlah Lembaga kursus yang menerapkan KKNI	1	2	2



		S.4.2.2	Pembinaan Lembaga PKBM	Terlaksananya pembinaan lembaga PKBM	100	100	100	100
S5	Peran serta masyarakat terhadap pendidikan			Meningkatnya peran serta masyarakat	100	100	100	100
	S.5.1	Penguatan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah		Terlaksananya koordinasi terhadap Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	100	100	100	100
		S.5.1.1	Peningkatan Peran dan fungsi komite sekolah	Terlaksananya pembinaan Peran dan fungsi komite sekolah	100	100	100	100

Dari tabel diatas indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokkan untuk mengetahui berapa indikator yang termasuk dalam katagori sangat baik, baik, cukup dan katagori kurang.

- Terdapat 20 indikator dengan nilai >90% mengalami kenaikan dengan katagori **sangat baik**
- 4 (Empat) indikator tercapai dengan nilai kinerja 70 % - 89,99 %; atau dengan katagori **baik**.
- 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja 55 % - 69,99 %; atau dengan katagori **cukup**.
- 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja < 55 % ; atau dengan katagori **kurang**.



## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di tahun 2017 dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor **Kpts./419.1/DISDIK/1/2017** terdapat 10 Indikator Kinerja Utama sebagai sasaran kinerja dinas Pendidikan. Penetapan indikator kinerja tersebut merupakan sasaran program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Yang telah ditetapkan target capaiannya, sehingga akan dapat dibandingkan seberapa besar realisasi dari masing-masing indikator sasaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan informasi capaian target yang telah ditetapkan. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2017 sebagai berikut :

### Sasaran 1

#### Perluasan Akses Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Anak Usia Dini merupakan program strategis, sehingga di perlukan kegiatan untuk peningkatan APK PAUD. Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD untuk Tahun 2017 adalah 28 angka ini masih rendah. Sehingga perlu adanya peningkatan dan perhatian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.

Perluasan akses pendidikan dasar untuk SD dan SMP masih sangat di perlukan mengingat keterbatasan daya tampung sekolah negeri terhadap anak usia sekolah di Kota Batam dan pola pikir masyarakat yang masih mengedepankan anaknya untuk bersekolah di sekolah negeri yang berbiaya murah (gratis). Capaian APK/APM SD adalah 104/92,84 dan capaian APK/APM SMP adalah 105,51/82,91.

Seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini



Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran Perluasan Akses Pendidikan Dasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		T	R	T	R
Perluasan Akses Pendidikan Dasar	APK TK	27	27	28	28
	APK SD	103,47	103,48	104,2	104
	APM SD	92	92	93	92,84
	APK SMP	102,45	102,45	105,50	105,51
	APM SMP	82	81,51	83	82,91

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat PAUD, Angka partisipasi kasar (APK) PAUD telah mencapai target. Pada Tahun 2017 capaian APK 28, melebihi capaian Tahun 2016 yaitu sebesar 27. Kenaikan capaian ditahun 2017 sebesar 1.
- Tingkat SD capaian APK ditahun 2017 sebesar 104, capaian ini tidak mencapai target yaitu 104,2. Jika di dibandingkan dengan capaian APK ditahun 2016 sebesar 103,48 maka terjadi kenaikan sebesar 0,52. Capaian APM SD ditahun 2017 sebesar 92,84 capaian ini tidak mencapai target yaitu 93. Bila dibandingkan dengan capaian APM tahun 2016 sebesar 92 terdapat kenaikan sebesar 0,84.
- Tingkat SMP capaian APK ditahun 2017 sebesar 105,51, capaian ini melebihi target yaitu 105,50. Jika di dibandingkan dengan capaian APK ditahun 2016 sebesar 102,45 maka terjadi kenaikan sebesar 3,06. Capaian APM SMP ditahun 2017 sebesar 82,91 capaian ini tidak mencapai target yaitu 83. Bila dibandingkan dengan capaian APM tahun 2016 sebesar 81,51 terdapat kenaikan sebesar 1,4.

## Sasaran 2

### Mutu Layanan Pendidikan

Sasaran Mutu Layanan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam, dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pengembangan kurikulum
2. Kondisi layak guna Sarana dan prasarana
3. Ketersediaan media Penunjang Pembelajaran
4. Peningkatan kualitas lulusan



5. Mutu tenaga pendidik dan kependidikan
6. Mutu pengawas sekolah

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Mutu Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		T	R	T	R
Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah berakreditasi minimal B				
	PAUD	36,46	36,46	41,35	39,99
	SD	53,58	53,58	56,00	64,53
	SMP	64,59	64,59	67,00	67,36

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat PAUD, Persentase sekolah berakreditasi minimal B belum mencapai target. Pada Tahun 2017 capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B adalah 39,99 melebihi capaian Tahun 2016 yaitu sebesar 36,46. Kenaikan capaian ditahun 2017 sebesar 3,53.
- Tingkat SD capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2017 sebesar 64,53, capaian ini melebihi target yaitu 56,00. Jika di bandingkan dengan capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2016 sebesar 53,58 maka terjadi kenaikan sebesar 10,95.
- Tingkat SMP capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2017 sebesar 67,36, capaian ini melebihi target yaitu 67,00. Jika di bandingkan dengan capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2016 sebesar 64,59 maka terjadi kenaikan sebesar 2,77.



### Sasaran 3

#### Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

1. Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland
2. Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		T	R	T	R
Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan	Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	66	66
	Persentase penyelesaian tata kelola perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100	100	100

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal di daerah hinterland, perlu di tingkatkan kualitas pelayanan UPTD. Keberadaan UPTD membantu dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan di daerah. Jumlah sekolah yang terlayani untuk daerah hinterland tahun 2016 dan tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu berjumlah 66 sekolah.
- Peningkatan kualitas Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sangat di perlukan. Meningkatnya kualitas ini dapat di lihat dari persentase



- dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan pelaporan selesai dengan tepat waktu 100% baik di tahun 2016 dan tahun 2017.
- Peningkatan Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan sangat di perlukan. Meningkatnya kualitas ini dapat di lihat dari persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu dan peningkatan disiplin aparatur dan pembinaan aparatur berjalan dengan baik.

#### Sasaran 4

#### Kualitas Sumber daya masyarakat

Sasaran kualitas sumber daya masyarakat diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk memajukan pendidikan dan peningkatan kualitas masyarakat melalui program pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat yang lulus di 5 universitas negeri melalui jalur undangan. Dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

1. Bantuan Pendidikan
2. Lembaga Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Kualitas Sumber daya masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		T	R	T	R
Kualitas Sumber daya masyarakat	Persentase tersalurnya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga pendidikan masyarakat	100	100	100	100



Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat yang lulus Universitas Negeri mengalami peningkatan di setiap tahunnya di sesuaikan dengan jumlah masyarakat yang menerima. Untuk di tahun 2016 dan tahun 2017 bantuan pendidikan tersalurkan 100%.
- Keberadaan lembaga pendidikan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan keterampilan melalui lembaga kursus. Pembinaan lembaga pendidikan masyarakat dan lembaga kursus terlaksana 100% baik ditahun 2016 dan tahun 2017.

## Sasaran 5

### Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan

Sasaran peran serta masyarakat terhadap pendidikan lebih memfokuskan kepada peningkatan peranan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam memajukan pendidikan. Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendorong perhatian dan komitmen masyarakat melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha) dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Dengan melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah



Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		T	R	T	R
Peran serta masyarakat terhadap pendidikan	Terlaksananya koordinasi terhadap Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	100	100	100	100

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koordinasi dewan pendidikan dan komite sekolah terhadap mitranya yaitu pemerintah dan masyarakat sudah terlaksana dengan baik.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran atas pencapaian target dalam kegiatan yang tertuang pada masing-masing indikator kegiatan secara rinci dapat dilihat pada data tabel terlampir. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam sampai dengan akhir tahun anggaran adalah 99,92%. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhasil mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Galang
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Bulang
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Blk Padang
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Batam Kota, Kec Nongsa
6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Sagulung, Kec. Sei Beduk
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong, Kec. Lubuk Baja
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Sekupang, Kec. Batu Aji
9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK
10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Belajar (SKB)
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah



12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tata Kelola Tenaga Kependidikan
13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMP Negeri Batam (56 Sekolah)
14. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SMPN)
15. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
16. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
17. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
18. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Ruang Penunjang Sekolah SMP
19. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan dasar SMP (DAK) Tahun 2017
20. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan dasar SMP (DAK) Tahun 2017
21. Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
22. Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik
23. Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran
24. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
25. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
26. Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK
27. Pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP/SMP
28. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SMP/SMP
29. Peningkatan Jaringan Informasi dan Statistik Pendidikan
30. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan

Perkembangan keadaan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan juga dipengaruhi oleh proses dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, prosedur pelelangan yang harus dipenuhi, biaya revisi anggaran kondisi alam terutama pada paket pekerjaan konstruksi.



#### D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kota Batam untuk Bidang Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Persentase realisasi keuangan untuk seluruh kegiatan baik Belanja Langsung Belanja tidak Langsung OPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam mencapai 99,92%. Yang teralokasi tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam untuk biaya operasional seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017.

Biaya operasional kegiatan tersebut terdiri dari belanja pegawai dalam bentuk honorarium, belanja barang jasa serta belanja modal. Pagu anggaran yang dialokasikan ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 277.244198.459,61 terealisasi sebesar Rp. 258.114.620.790,58.

Selain itu untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah juga melakukan penambahan alokasi anggaran melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian pembangunan bidang pendidikan diharapkan tetap terselenggara sesuai perencanaan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Batam.

Berikut disajikan tabel rincian realisasi anggaran tahun 2017.

Tabel 3.7 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2017		TAHUN 2016	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Target Keuangan	277.244.198.459,61	99,92	289.524.291.199,56	98,85
2	Realisasi Keuangan	258.114.620.790,58	93,10	268.951.691.344,00	92,89

*Sumber: Laporan keuangan Dinas Pendidikan*



## 1. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2017 sebesar Rp.277.527.277.899,35 ( Perda Perubahan APBD) dan terealisasi sebesar Rp. 274.230.899.760,89 atau 98,46% sehingga Belanja Pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.296.378.138,46 atau 1,54%. Jika dibandingkan Belanja Pegawai tahun 2016 sebesar Rp. 360.086.407.604,00, maka pada Tahun 2017 terjadi penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp. 82.559.129.704,65 atau 22,92%. Ini dikarenakan adanya Pelimpahan wewenang Sekolah Menengah Tingkat Atas ke Pemerintah Provinsi.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja Pegawai tahun 2017 dan 2016 di Dinas Pendidikan Kota Batam disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016-2017

No	URAIAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017
1	Gaji pokok	131.390.097.504,40	129.518.752.399,35
2	Tunjangan Keluarga	13.118.400.173,97	10.039.545.545,34
3	Tunjangan Jabatan	274.756.300,00	239.666.875,36
4	Tunjangan Fungsional	13.120.398.000,00	8.611.794.905,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	1.087.799.700,00	1.035.961.353,35
6	Tunjangan Beras	8.583.786.728,80	6.977.794.200,35
7	Tunjangan PPH	2.264.619.627,83	199.736.328,63
9	Pembulatan Gaji	106.920.000,00	2.181.253,52
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.026.200.000,00	148.008.525.500,00
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	105.162.000.000,00	77.225.114.000,00
12	Tambahan Penghasilan Guru PNSMP	4.153.500.000,00	1.539.000.000,00
13	Tunjangan Profesi Guru	78.902.882.000,00	63.989.899.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan



## 2. Belanja Barang Jasa

Anggaran Belanja Barang Jasa untuk Tahun 2017 sebesar Rp.124.079799.815,98 ( Perda Perubahan APBD). Jika dibandingkan Belanja Barang Jasa tahun 2016 sebesar Rp. 63.373.737.634,40, maka pada Tahun 2017 terjadi Peningkatan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 50.553.860.752,18 atau 55,62%. Ini dikarenakan anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri dan SMP Negeri tercatat dalam APBD Pemerintah Daerah pada Tahun 2017.

Ada 25 unsur yang ada dalam Belanja barang dan jasa dan pengeluaran terbesar digunakan untuk Belanja Honorarium Non PNSMP/BLUD/Dana BOS/Kapitasi sebesar Rp. 111.952.800.000,00 Pada dinas Pendidikan Kota Batam.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2017

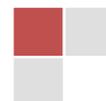
NO	URAIAN	REALISASI 2017
<b>1</b>	<b>Honorarium Non PNSMP/BLUD/Dana BOS/Kapitasi</b>	<b>111.952.800.000,00</b>
	Honorarium Jasa Narasumber	177,400,000.00
	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	1,837,923,500.00
	Gaji Bulanan / Tenaga Kependidikan (Dana BOS)	13,135,168,000.00
	Honor Kegiatan (Dana BOS)	665,968,000.00
	Honor Kelebihan Jam Mengajar (Dana BOS)	286,380,000.00
	Upah Tukang (Dana BOS)	1,287,900,900.00
	Honor Penulisan Ijazah (Dana BOS)	349,618,500.00
	Honor Operator Dapodik (Dana BOS)	7,400,000.00
	Bendahara Barang (Dana BOS)	1,494,340,000.00
	Bendahara BOS (Dana BOS)	485,100,000.00
	Pembantu Bendahara (Dana BOS)	933,076,000.00



	Honor Narasumber (Dana BOS)	53,000,000.00
	Insentif Tim Penyusunan ( Dana Bos )	618,125,000.00
	Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap	1,459,488,000.00
	Upah Buruh/Tenaga Kerja	61,800,000.00
	Uang Saku Peserta	201,410,000.00
	Honorarium Guru	111,952,800,000.00
<b>2</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>3,288,750,000.00</b>
	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	3,288,750,000.00
<b>3</b>	<b>Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis</b>	<b>14,570,208,764.00</b>
	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis	8,470,854,710.00
	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis	632,021,800.00
	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	426,400,000.00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3,399,872,880.00
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,000,000.00
	Belanja Cinderamata	208,686,000.00
	Belanja Peralatan / Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis	566,510,134.00
	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya	864,863,240.00
<b>4</b>	<b>Belanja Bahan dan Material</b>	<b>5,053,469,550.00</b>
	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,939,317,150.00
	Belanja Bahan Obat-obatan	388,267,500.00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	219,337,800.00
	Belanja Perlengkapan Peserta	1,043,192,000.00
	Belanja Peralatan Olahraga	877,705,600.00



	Belanja Bahan dan Material Lainnya	585,649,500.00
<b>5</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,675,487,774.00</b>
	Belanja Rekening Telepon	519,173,000.00
	Belanja Rekening Air	1,180,763,038.00
	Belanja Rekening Listrik	3,408,958,536.00
	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	312,852,000.00
	Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili	1,103,871,200.00
	Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor	3,840,000.00
	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan	146,030,000.00
	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2,088,746,640.00</b>
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2,088,746,640.00
<b>7</b>	<b>Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi</b>	<b>12,126,306,788.00</b>
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	2,026,823,960.00
	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	10,047,327,828.00
	Belanja Dokumentasi Foto dan Video	52,155,000.00
<b>8</b>	<b>Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/gudang/Parkir</b>	<b>1,921,305,000.00</b>
	Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya	116,000,000.00
	Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan	1,755,105,000.00
	Belanja Sewa Lapangan Olahraga	42,200,000.00
	Belanja Sewa Tenda	8,000,000.00
<b>9</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,796,000,000.00</b>
	Belanja Sewa Alat Angkut Darat	71,000,000.00
	Belanja Sewa Alat angkut Air	1,725,000,000.00



<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>10,375,000.00</b>
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	500,000.00
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	9,875,000.00
<b>11</b>	<b>Belanja Konsumsi</b>	<b>4,026,520,700.00</b>
	Belanja Konsumsi Tamu	24,000,000.00
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	4,002,520,700.00
<b>12</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus</b>	<b>422,155,121.00</b>
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11,648,000.00
	Belanja Pakaian Olahraga	129,346,921.00
	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	281,160,200.00
<b>13</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,430,586,000.00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	295,840,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,134,746,000.00
<b>14</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>51,050,000.00</b>
	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	51,050,000.00
<b>15</b>	<b>Belanja Jasa Pihak Ketiga</b>	<b>208,250,000.00</b>
	Belanja Jasa Bidang Kesehatan	8,250,000.00
	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	200,000,000.00
<b>16</b>	<b>Belanja Transportasi</b>	<b>17,805,896,200.00</b>
	Belanja Transportasi Udara	267,200,000.00
	Belanja Transportasi Air	1,670,726,000.00
	Belanja Transportasi Darat	15,867,970,200.00
<b>17</b>	<b>Belanja Akomodasi</b>	<b>682,356,000.00</b>
	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	682,356,000.00
<b>18</b>	<b>Belanja Pajak, Retribusi dan Iuran Lainnya</b>	<b>514,406,450.00</b>



	Belanja Pajak Daerah	10,300,000.00
	Belanja Retribusi Daerah	101,490,000.00
	Belanja Iuran Lainnya	402,616,450.00
<b>19</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Tanah</b>	<b>578,526,498.00</b>
	Belanja Pemeliharaan Taman	578,526,498.00
<b>20</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>108,000,000.00</b>
	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	108,000,000.00
<b>21</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>1,192,919,975.00</b>
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel	7,700,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,038,207,375.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	29,200,000.00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	117,812,600.00
<b>22</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>6,905,053,089.00</b>
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	667,553,250.00
	Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan	5,049,554,240.00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,187,945,599.00
<b>23</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>153,717,100.00</b>
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	143,717,100.00
	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	10,000,000.00
<b>24</b>	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>4,800,000.00</b>
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4,800,000.00
<b>25</b>	<b>Belanja BOP PAUD Negeri</b>	<b>640,000,000.00</b>
	Belanja BOP PAUD Negeri.	640,000,000.00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2017

### 3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan, anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 51.868.772.073,03. Jika dibandingkan dengan Belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 105.418.451.719,14, maka terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp.53.549.679.645,84.



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Modal 2017

NO	URAIAN	REALISASI 2017
	<b>Belanja Modal</b>	<b>51.868.772.073,03</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Air Bermotor</b>	<b>200,000,000.00</b>
	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Alat -Alat Angkutan Air Bermotor Lain-lain	200,000,000.00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>836,422,800.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	41,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	8,440,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	3,435,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Scan Jari	8,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah	181,406,100.00
	Belanja Modal Pengadaan Gordin/Vitrage/Reel Alumunium	313,368,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	12,403,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	268,370,700.00
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>3,174,658,250.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Almari	1,176,859,800.00
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	90,242,400.00
	Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan Pengumuman	756,675,350.00
	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan	548,380,100.00
	Belanja Modal Pengadaan Televisi	29,730,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Tenda	136,790,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	7,917,700.00
	Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	428,062,900.00
<b>4</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>2,173,029,900.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	150,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	726,154,500.00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	475,492,250.00
	Belanja Modal Pengadaan Printer	379,222,250.00
	Belanja Modal Pengadaan Scanner	86,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	25,075,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer	96,010,900.00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	82,075,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer	153,000,000.00
<b>5</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>5,583,426,700.00</b>



	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	295,302,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	9,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	225,615,800.00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5,500,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	55,356,500.00
	Belanja Modal Pengadaan Sofa	268,300,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku	167,666,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	14,035,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Meja Lainnya	4,023,361,200.00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya	519,290,200.00
<b>6</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>944,010,323.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Camera	69,220,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	402,950,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Microfon	56,644,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Speaker	89,495,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Amplifier	35,900,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Sound System	176,920,079.00
	Belanja Modal Pengadaan Mic Tiang	30,681,244.00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	82,200,000.00
<b>7</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>4,100,000.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Telepon	4,100,000.00
	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>5,851,409,500.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	5,851,409,500.00
<b>8</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>214,047,765.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	214,047,765.00
<b>9</b>	<b>Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>37,096,901,383.76</b>
	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar Pengaman	417,457,635.00
	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	35,428,896,248.76
	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung dan Bangunan Lainnya	1,250,547,500.00
<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>12,589,303,149.42</b>
	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	45,644,300.00
	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	12,838,200.00
	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	4,550,000.00
	Belanja modal buku bahasa dan sastra	41,760,100.00



	Belanja modal buku keagamaan	25,681,400.00
	Belanja modal buku seni dan budaya	15,133,400.00
	Belanja modal buku ilmu pengetahuan umum	304,557,700.00
	Belanja modal buku ilmu pengetahuan social	12,238,000.00
	Belanja modal buku ilmu pengetahuan dan teknologi	26,600,000.00
	Belanja modal buku ensiklopedia	1,940,120,903.17
	Belanja modal buku kamus bahasa	37,500,000.00
	Belanja modal buku naskah	150,000,000.00
	Belanja modal peta/atlas/globe	1,533,460,834.25
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya	8,439,218,312.00
<b>11</b>	<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>406,979,000.00</b>
	Belanja Modal Peralatan Marching Band	148,637,500.00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan Lainnya	258,341,500.00
<b>12</b>	<b>Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>	<b>277,668,000.00</b>
	Belanja Modal Peralatan CCTV	277,668,000.00
<b>13</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga</b>	<b>109,608,000.00</b>
	Belanja Alat Peraga Edukatif	109,608,000.00



## ***Bab 4***

### ***Penutup***

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai sasaran kinerja yang direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja secara fisik dapat direalisasikan 100 %.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Tinjauan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batam disusun sebagai upaya untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibidang Pendidikan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap perkembangan di lingkungan masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai alat umpan balik manajemen yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di jajaran Dinas Pendidikan Kota Batam.



## **B. Tinjauan Khusus**

LKjIP ini telah menyajikan sebagian dari perencanaan strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dengan berbagai kendala dan hambatan serta upaya-upaya pemecahan masalah yang ditempuh.

Pencapaian kinerja suatu instansi di lingkungan pemerintahan dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing OPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2016-2021 terdiri dari 5 Sasaran dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **C. Saran dan Tindak Lanjut**

LKjIP di susun sebagai bahan laporan di tahun 2017 dan evaluasi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2018, agar perbaikan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan kualitas pelayanan pendidikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2017, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Amin

Batam, Januari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Batam

MUSLIM BIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580412 198703 1 011



## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Walikota Batam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Batam.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mengelola pendidikan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dan dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan/kebijakan program dalam pembangunan Pendidikan Selanjutnya.

Batam, Januari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

**MUSLIM BIDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580412 198703 1 011

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I      PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas pokok dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Visi dan Misi	8
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan	9
B. Rencana Strategis	11
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN	43
A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	45
B. Analisis Capaian Kinerja	55
C. Realisasi Anggaran	61
D. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	63
BAB IV    PENUTUP	73
A. Tinjauan Umum	73
B. Tinjauan Khusus	74
C. Saran dan Tindak Lanjut	74
LAMPIRAN	



# Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Sekolah di Kota Batam .....	4
Tabel 1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS .....	5
Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam .....	5
Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	6
Tabel 1.5. Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian .....	6
Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan .....	7
Tabel 1.7. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas .....	7
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama .....	10
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan .....	11
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan .....	46
Tabel 3.2. Realisasi Sasaran Perluasan Akses Pendidikan Dasar .....	52
Tabel 3.3. Realisasi Sasaran Mutu Layanan Pendidikan .....	57
Tabel 3.4. Realisasi Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan .....	58
Tabel 3.5. Realisasi Sasaran Kualitas Sumber daya masyarakat .....	59
Tabel 3.6. Realisasi Sasaran Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan .....	61
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017 .....	63
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016-2017 .....	64
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2017 .....	65
Tabel 3.10. Realisasi Belanja Modal 2017 .....	70



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Laporan ini diawali dengan perumusan perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, pengukuran serta ditindak lanjuti dengan penyusunan LKjIP.

## **1. Perencanaan Strategis ( Renstra )**

Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam yang ditetapkan dalam tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam renstra meliputi :

- Pernyataan tentang Visi dan Misi.
- Faktor-faktor penentu keberhasilan.
- Penetapan Tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perumusan Renstra ini merupakan jawaban atas perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting.

Sesuai Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun untuk tahun 2017 terdapat 5 sasaran, 6 Program dan 85 Kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan APBD DPA SKPD tahun 2017 yang tersedia sebesar Rp.554.771.476.358,96.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 10 sasaran yang telah ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kinerja 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.



## **2. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam**

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam ditetapkan berdasarkan rumusan Renstra yang dijabarkan dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan, sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2017, sehingga pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilakukan secara utuh.

Evaluasi Kinerja yang digunakan disajikan pada lampiran berdasarkan formulasi indikator kinerja yang telah dirumuskan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya faktor-faktor penunjang antara lain :

Pendanaan yang memadai, tenaga yang cukup, sarana dan prasarana serta dukungan lintas dinas dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.

## **3. Rencana dan Realisasi Anggaran**

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp. 554.771.476.358,96 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 511.102.886.851,58 atau 92,13%. Adapun jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp.277.527.277.899,35 dengan realisasi sebesar Rp.252.988.266.061,00 (91,15%) sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp.277.244.198.459,61 terealisasi sebesar Rp.258.114.620.790,58 (93,10%).

